

The logo of the Pengadilan Negeri Tanah Grogot is a circular emblem. It features a central shield with a red and white design, topped by a golden crown. The shield is surrounded by a golden wreath. The outer ring of the emblem contains the text 'PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT' in a light green font. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the title text.

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI
TANAH GROGOT KELAS II

TRIWULAN KE IV 2021

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang stranas PPK jangka panjang 2012- 2025 dan Stranas PPK jangka Menengah tahun 2012-2019.

Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Presiden secara tegas mengintruksikan kepada semua jajaran pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan stranas PPK (Transparency International. tahun 2016).

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara dalam bidang penegakan hukum turut mendukung program pemerintah tersebut dan berupaya terus mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya kegiatan layanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai salah satu satker di daerah yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat telah berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan menciptakan layanan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan pada bulan Oktober tahun 2021 Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II melakukan survey untuk mengukur indeks persepsi knrupsi dari responden yang mendapatkan layanan. Penilaian indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Laporan ini menyajikan sejauh mana fungsi layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yang akuntabel dan transparan di mata masyarakat Terimakasih atas dukungan semua pihak, Semoga laporan Indeks Persepsi Korupsi ini berguna untuk kita semua.

Tanah Grogot, 31 Desember 2021
Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner Berbentuk online
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (Empat kali dalam satu tahun).



METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan atau data minimal 150 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil responden

- Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 2 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 6 ORG
	SMU : 10 ORG	S2 : 0 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG

- Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 14 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya

PEKERJAAN	PNS : 0 ORG	SWASTA : 4 ORG
	TNI : 1 ORG	WIRUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 14 ORG	

- Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun ke atas ,

jumlah responden semakin mengecil,

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	4	21,05
29 - 39 Th	8	42,11
40 - 49 Th	2	10,53
50 - 59 Th	5	26,32
60 - 69 Th	0	0,00
Total	19	

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Tanah Grogot**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan
Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tingkatkan Keramahan dalam pelayanan
2	Pelayanan Pengadilan sangat baik, lebih ditingkatkan lagi pelayanannya
3	Petugas pelayanan pengaduan sangat jujur dalam melayani masyarakat sehingga diharapkan petugas pelayanan dapat mempertahankan kejujuran tersebut.

DAFTAR PERTANYAAN IPAK

1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? <input type="radio"/> Tidak Sesuai Prosedur <input type="radio"/> Jarang Sesuai Prosedur <input type="radio"/> Sering Sesuai Prosedur <input type="radio"/> Selalu Sesuai Prosedur
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk memi <input type="radio"/> Petugas melayani selalu meminta imbalan <input type="radio"/> Petugas melayani sering meminta imbalan <input type="radio"/> Petugas melayani jarang meminta imbalan <input type="radio"/> Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? <input type="radio"/> Selalu <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Tidak Ada
4	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Penga <input type="radio"/> Tidak Pernah <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Selalu
5	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? <input type="radio"/> Tidak Pernah <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Selalu
6	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? <input type="radio"/> Selalu <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Tidak Ada
7	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? <input type="radio"/> Tidak Pernah <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Selalu
8	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? <input type="radio"/> Selalu <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Tidak Ada
9	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? <input type="radio"/> Selalu <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Tidak Ada
10	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ? <input type="radio"/> Selalu <input type="radio"/> Sering <input type="radio"/> Jarang <input type="radio"/> Tidak Ada

Data nilai per unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	80	80	80	80	80	76	80	80	80	80	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,800	4,000	4,000	4,000	4,000	39,800
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,380	0,400	0,400	0,400	0,400	3,980
IPAK Unit Pelayanan											3,98

HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI LAYANAN PENGADILAN SECARA ONLINE

SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,50%

KESIMPULAN

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi

TINDAK LANJUT

1. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberlakukan tarif resmi sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri mengenai panjar biaya perkara, tanpa ada biaya tambahan. Para pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak diperkenankan untuk memungut biaya tambahan apa pun selain dari biaya perkara yang telah ditentukan tersebut.
2. Semua pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak ada praktek penyalahgunaan jabatan dari petugas dan tidak ada lagi praktek pemberian imbalan dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	SABBURHAN SAHDIQ MARIADI R-400302-IPAK-1CA60F555F	KALIMANTAN TIMUR	26 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	21 Desember 2021
2	SUPRIYANTO R-400302-IPAK-878E282F00	KALIMANTAN TIMUR	39 Tahun Laki-laki	Diploma 3 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 November 2021
3	SAMPARA, SH R-400302-IPAK-0E74636B4E	KALIMANTAN TIMUR	34 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 November 2021
4	NASRULLAH R-400302-IPAK-7C6F8EB3EE	KALIMANTAN TIMUR	55 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 November 2021
5	Said Kaharuddin R-400302-IPAK-0ED07B8F36	KALIMANTAN TIMUR	45 Tahun Laki-laki	S1 WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Oktober 2021
6	Tukul R-400302-IPAK-84FA8E44AD	KALIMANTAN TIMUR	45 Tahun Laki-laki	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Oktober 2021
7	SETYARINI R-400302-IPAK-FEE7D57AC2	KALIMANTAN TIMUR	32 Tahun Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Oktober 2021
8	TUKUL R-400302-IPAK-52271BDE91	KALIMANTAN TIMUR	57 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Oktober 2021
9	Aminullah R-400302-IPAK-66F8ABC273	KALIMANTAN TIMUR	72 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Oktober 2021
10	HERLENA R-400302-IPAK-F4C5B16CA8	KALIMANTAN TIMUR	38 Tahun Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Oktober 2021

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
11	BENI R-400302-IPAK-9FF269EFCC	KALIMANTAN TIMUR	55 Tahun Laki-laki	SMU TNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Oktober 2021
12	TRI YONO R-400302-IPAK-739AF15016	KALIMANTAN TIMUR	28 Tahun Laki-laki	SMU SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Oktober 2021
13	Isna R-400302-IPAK-113BD57166	KALIMANTAN TIMUR	36 Tahun Perempuan	Diploma 3 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Oktober 2021
14	IBRAHIM R-400302-IPAK-CA51B73A84	KALIMANTAN TIMUR	53 Tahun Laki-laki	S1 SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Oktober 2021
15	Unun R-400302-IPAK-AA3DED5536	KALIMANTAN TIMUR	33 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Oktober 2021
16	SETYARINI R-400302-IPAK-A806EE6F6B	KALIMANTAN TIMUR	23 Tahun Perempuan	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Oktober 2021
17	ABD HAMID R-400302-IPAK-9974FB390B	KALIMANTAN TIMUR	38 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Oktober 2021
18	Muhammad Azis Syahrani R-400302-IPAK-E79620C13C	KALIMANTAN TIMUR	23 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	7 Oktober 2021
19	NASRULLAH R-400302-IPAK-7F78C8DE5D	KALIMANTAN TIMUR	55 Tahun Laki-laki	SD LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Oktober 2021
20	HERLENA R-400302-IPAK-1DD591BC27	KALIMANTAN TIMUR	38 Tahun Perempuan	SD LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 Oktober 2021